



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**  
**DIREKTORAT PENGAWASAN BADAN USAHA KONEKTIVITAS,**  
**PARIWISATA, KAWASAN INDUSTRI, DAN PERUMAHAN**  
Jl. Pramuka No. 33 Jakarta-Timur 10120  
Telepon (021)85910353 Faksimile: (021) 85910353

Nomor : OT.04/LKIN-99/D402/2/2023

30 Juni 2023

Hal : Laporan Kinerja Triwulan II Tahun  
2023 Direktorat Pengawasan Badan  
Usaha Konektivitas, Pariwisata,  
Kawasan Industri dan Perumahan

Yth. Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara  
di Jakarta

Dengan ini kami sampaikan Laporan Kinerja Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan Triwulan II Tahun 2023 sebagai berikut:

#### A. Capaian Outcome sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Hasil pengukuran kinerja outcome Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 1  
Ringkasan Capaian Outcome  
Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata,  
Kawasan Industri dan Perumahan  
s.d Triwulan II Tahun 2023

	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target		Realisasi TW II	Capaian (%)		Rata-rata Capaian s.d. TW II (%)
			Tahun 2023	s.d TW II		Tahun 2023	s.d TW II	
	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<b>Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas dukungan fiskal badan usaha terhadap keuangan negara dan daerah</b>							175
1.1	Jumlah badan usaha dengan tingkat dukungan fiskal terhadap keuangan negara dan daerah kategori baik	Jumlah	7	7	14	14	200	
1.2	Jumlah BUMN dengan Kinerja Sehat	Jumlah	12	12	18	18	150	
2.	<b>Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas dukungan Badan Usaha terhadap Pembangunan Nasional</b>							182
2.1	Jumlah badan usaha dengan tingkat dukungan terhadap pembangunan nasional kategori baik	Jumlah	9	9	17	17	188,89	

	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target		Realisasi TW II	Capaian (%)		Rata-rata Capaian s.d. TW II (%)
			Tahun 2023	s.d TW II		Tahun 2023	s.d TW II	
			4	5		7	8	
2	3	4	5	6	7	8	9	
2.2	Jumlah PSN yang tercapai sesuai target	Jumlah	4	2	7	7	175	
<b>3.</b>	<b>Meningkatnya Kepatuhan dan Efektivitas Operasional Badan Usaha</b>							<b>137.5</b>
3.1	Jumlah Badan Usaha dengan Efektivitas Operasional Baik	Jumlah	16	16	22	22	137,5	
<b>4.</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola BUMN/D/BLUD</b>							<b>80</b>
4.1	Persentase BUMN dengan tata kelola korporasi baik	Jumlah	15	15	8	12	80	
<b>5.</b>	<b>Meningkatnya Akuntabilitas Badan Usaha</b>							<b>122.22</b>
5.1	Jumlah Badan Usaha dengan Akuntabilitas Badan Usaha yang Baik	Jumlah	9	9	11	11	122,22	
<b>6.</b>	<b>Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Badan Usaha</b>							<b>119.17</b>
6.1	Jumlah K/L dengan MRI $\geq$ Level 3	Jumlah	2	2	0	2	100	
6.2	Jumlah K/L dengan Maturitas SPIP $\geq$ Level 3	Jumlah	2	2	0	3	150	
6.3	Jumlah APIP K/L dengan Kapabilitas APIP $\geq$ Level 3	Jumlah	2	2	0	3	150	
6.4	Jumlah BUMN dengan MRI $\geq$ Level 3	Jumlah	24	24	0	23	95.83	
6.5	Jumlah BUMN dengan Kapabilitas SPI $\geq$ Level 3	Jumlah	5	5	0	5	100	
<b>7.</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Layanan Deputi Bidang Akuntan Negara</b>							<b>33,33</b>
7.1	Indeks Kualitas layanan Eksternal Direktorat	Indeks Skala 100	80	80	0	0	-	
7.2	Jumlah layanan eksternal yang dapat dijalankan menggunakan teknologi informasi	Jumlah	1	1	0	1	100	
7.3	Jumlah inovasi layanan yang mampu memberikan dampak terhadap percepatan dan peningkatan kualitas layanan	Jumlah	1	1	0	0	-	
<b>8.</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Implementasi Pengendalian Risiko pada Deputi Bidang</b>							<b>28.57</b>

	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target		Realisasi TW II	Capaian (%)		Rata-rata Capaian s.d. TW II (%)
			Tahun 2023	s.d TW II		Tahun 2023	s.d TW II	
			2	3		4	5	
	<b>Akuntan Negara</b>							
8.1	Persentase efektivitas pengendalian intern (SPIP Unit Kerja)	Persen	70	70	0	0	-	
8.2	Persentase penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	Persen	100	100	57,14	57,14	57,14	

Kinerja Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 pada tabel 1 di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

<b>Sasaran Program 1</b>	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas dukungan fiskal badan usaha terhadap keuangan negara dan daerah
--------------------------	--

Keberhasilan sasaran program 1 diukur melalui dua indikator yaitu:

1. Jumlah Badan Usaha dengan tingkat dukungan fiskal terhadap keuangan negara dan daerah kategori Baik

Indikator ini diukur menggunakan hasil skor dimensi 2 Indeks Akuntabilitas BUMN {Indonesian Corporate Accountability Index/ICORPAX), yaitu Akuntabilitas Korporasi pada Keuangan Negara. Badan Usaha dengan tingkat dukungan fiskal terhadap keuangan negara/daerah kategori Baik diukur dengan menggunakan empat parameter yaitu:

- a. Capaian Target Dividend Payout Ratio
- b. Persentase Realisasi Pembayaran Pajak
- c. Persentase Realisasi Pembayaran Penerimaan Negara Lainnya
- d. Kontribusi Dividen BUMN terhadap Target Dividen Nasional (APBN)

2. Persentase BUMN dengan kinerja sehat

Indikator ini juga dinilai dengan menggunakan hasil skor dimensi 2 ICORPAX, dimana BUMN dengan kinerja "Sehat" diukur berdasarkan dua parameter, yaitu:

- a. Kesehatan Keuangan Korporasi
- b. Growth Kinerja Keuangan

Target kinerja Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan pada Tahun 2023 adalah sebanyak 7 BUMN dengan tingkat dukungan fiskal baik, dan 12 BUMN dengan kinerja sehat.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, capaian untuk target BUMN dengan tingkat dukungan fiskal baik, berdasarkan hasil penilaian Icorpax yang dilakukan pada Triwulan II Tahun 2023 adalah sebanyak 14 BUMN atau 200% dari target. Sedangkan capaian untuk target BUMN dengan kinerja sehat adalah sebanyak 18 BUMN atau 150% dari target.

Rincian BUMN dengan tingkat dukungan fiskal baik dan BUMN dengan kinerja Sehat adalah sebagai berikut:

<b>BUMN dengan Dukungan Fiskal Baik</b>	<b>BUMN dengan Kinerja Sehat</b>
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.	Perum Produksi Film Negara
PT Surabaya Industrial Estate Rungkut	PT Surabaya Industrial Estate Rungkut
PT Kawasan Industri Medan (Persero)	PT Kawasan Industri Medan (Persero)
PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)	PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)
PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)	PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)
PT Kawasan Industri Makassar (Persero)	PT Kawasan Industri Makassar (Persero)
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	PT Kereta Api Indonesia (Persero)
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)
PT Angkasa Pura I (Persero)	PT Pos Indonesia (Persero)
PT Angkasa Pura II (Persero)	Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia
PT TWC Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko (Persero)	PT Angkasa Pura I (Persero)
	PT Angkasa Pura II (Persero)
	PT TWC Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko (Persero)
	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
	PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)

<b>Sasaran Program 2</b>	<b>Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas dukungan Badan Usaha terhadap Pembangunan Nasional</b>
--------------------------	--

Pencapaian Sasaran Program 2 diukur melalui dua indikator yaitu:

1. Jumlah Badan Usaha dengan tingkat dukungan terhadap pembangunan nasional kategori Baik

Badan Usaha dengan tingkat dukungan terhadap pembangunan nasional kategori Baik diukur melalui skor dimensi 1 ICORPAX, melalui penilaian terhadap dua parameter, yaitu:

- a. Tingkat Kinerja Korporasi, yaitu capaian KPI yang terkait dengan proses bisnis utama.
- b. Tingkat Dukungan Korporasi pada Agenda Pembangunan. Tingkat dukungan ini dinilai melalui beberapa aspek penilaian yaitu: Kesesuaian

produk lini bisnis utama terhadap program prioritas pemerintah, keberhasilan pelaksanaan atas penugasan pemerintah, cakupan penugasan pemerintah, pencapaian target penugasan, serta ada tidaknya penugasan dari pemerintah yang bermasalah.

Target kinerja untuk indikator BUMN dengan dukungan terhadap Pembangunan Nasional kategori Baik adalah 9 BUMN. Capaian sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 yang diperoleh melalui hasil penilaian Icorpax adalah sebanyak 17 BUMN, atau 188,89% dari target.

Rincian BUMN dengan dukungan terhadap Pembangunan Nasional Kategori Baik adalah sebagai berikut:

No	BUMN dengan Dukungan terhadap Pembangunan Nasional Baik
1.	PT LEN Industri (Persero)
2.	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
3.	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.
4.	Perum Produksi Film Negara
5.	PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)
6.	Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara
7.	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)
8.	PT Kereta Api Indonesia (Persero)
9.	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
10.	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)
11.	PT Pos Indonesia (Persero)
12.	Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia
13.	PT Angkasa Pura I (Persero)
14.	PT Hotel Indonesia Natour (Persero)
15.	PT TWC Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko (Persero)
16.	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
17.	PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)

## 2. Jumlah PSN yang tercapai sesuai target

Jumlah PSN yang mencapai target adalah Proyek Strategi Nasional yang dilaksanakan oleh BUMN yang capaian fisik proyek mencapai atau melebihi target fisik pada tahun yang bersangkutan. Indikator ini menunjukkan sejauh mana keberhasilan proyek Strategis nasional mencapai target yang ditetapkan.

Reviu dan monitoring terhadap tata kelola PSN dilaksanakan pada setiap triwulan. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 capaian kinerja indikator ini adalah 7 PSN yang mencapai target fisik, atau 175% dibandingkan targetnya sebanyak 4 PSN. PSN yang mencapai target fisik yaitu:

Tabel 2  
PSN yang mencapai target fisik s.d. Triwulan II Tahun 2023

No.	Nama PSN	% Target	% Realisasi
1	Pembangunan Fly Over dari dan menuju Terminal Teluk Lamong	100	100
2	Terminal Multipurpose Labuan Bajo	100	100
3	Pengembangan Pelabuhan Terminal Kijing	100	100
4	Pengembangan Pelabuhan Kupang	100	100
5	Pengembangan Pelabuhan Hub Internasional Bitung	100	100
6	Bandar Udara Baru Yogyakarta-Kulon Progo	100	100
7	Pengembangan Bandar Udara Internasional Lombok Praya	100	100

<b>Sasaran Program</b>	3	<b>Meningkatnya Kepatuhan dan Efektivitas Operasional Badan Usaha</b>
------------------------	---	---

Pencapaian Sasaran Program 3 ditunjukkan dengan pencapaian satu indikator kinerja yaitu Persentase Badan Usaha dengan Efektivitas Operasional Baik, dengan kriteria BUMN yang mampu mengelola proses bisnisnya dengan baik, memiliki skor kepuasan pelanggan yang baik, mampu mengelola aset dengan efektif, serta melaksanakan tanggung jawab sosialnya (CSR dan PKBL) secara efektif.

Indikator ini diukur menggunakan hasil skor Dimensi 3 ICORPAX, yaitu Kepatuhan dan Efektivitas Operasional, dengan parameter penilaian sebagai berikut:

1. Tingkat kepatuhan, yang dinilai melalui ada atau tidaknya permasalahan hukum yang dihadapi serta kepatuhan terhadap regulasi industri dimana BUMN tersebut melakukan bisnisnya.
2. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL), yang dinilai melalui keselarasan program TJSL dengan program prioritas pencapaian SDGs, keberadaan program TJSL yang mendukung bisnis inti dan menciptakan shareholder value, serta jumlah mitra binaan yang naik kelas melalui peningkatan kapasitas usaha.
3. Tingkat Kepuasan, baik pelanggan, vendor maupun pegawai.
4. Tingkat Efektivitas Proses Bisnis, yang dinilai melalui pemenuhan Service Level Agreement, penerapan E-Procurement, keberadaan inovasi, penerapan teknologi informasi, serta pengelolaan SDM.
5. Tingkat Efektivitas Pengelolaan Aset, yang dinilai melalui penerapan Asset Management Policy, Asset Management Plans, Asset Portfolio, Rasio Return on Asset, serta Rasio Fixed Asset Turnover.

Target kinerja untuk indikator BUMN dengan Efektivitas Operasional Baik adalah 16 BUMN. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, melalui penilaian Icorpax, capaian untuk indikator ini adalah sebanyak 22 BUMN, atau 137,50% dari target.

Rincian BUMN dengan efektivitas operasional baik adalah sebagai berikut:

No	BUMN dengan Efektivitas Operasional Baik
1	PT LEN Industri (Persero)
2	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
3	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.
4	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung
5	PT Surabaya Industrial Estate Rungkut
6	PT Kawasan Industri Medan (Persero)
7	PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)
8	PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)
9	PT Kawasan Industri Makassar (Persero)
10	Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara
11	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)
12	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)
13	PT Kereta Api Indonesia (Persero)
14	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
15	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)
16	PT Pos Indonesia (Persero)
17	Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia
18	PT Angkasa Pura I (Persero)
19	PT Angkasa Pura II (Persero)
20	PT Hotel Indonesia Natour (Persero)
21	PT TWC Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko (Persero)
22	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

<b>Sasaran Program</b>	<b>4</b>	<b>Meningkatnya kualitas Kualitas Tata Kelola BUMN/D/BLUD</b>
------------------------	----------	---

Pencapaian Sasaran Program 4 ditunjukkan dengan pencapaian indikator kinerja persentase BUMN dengan tata kelola korporasi baik.

Pada tingkat sasaran strategis, keberhasilan sasaran diukur dengan menggunakan hasil skor dimensi 4 ICORPAX yaitu Dimensi Efektivitas Sistem Tata Kelola Korporasi, yang dinilai melalui empat parameter, yaitu:

1. Tingkat Efektivitas Tata Kelola (GCG), yang akan dinilai melalui pelaksanaan hak-hak stakeholder, transparansi, tanggung jawab direksi, serta skor asesmen GCG.
2. Tingkat Efektivitas Manajemen Risiko, yang akan dinilai melalui keberadaan framework, pelaksanaan proses manajemen risiko, serta hasil pengukuran risk maturity level.
3. Tingkat Kapabilitas Satuan Pengawas Internal, yang akan diukur melalui hasil pengukuran kapabilitas SPI dan persentase tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan SPI.

4. Tingkat Efektivitas Sistem Pengendalian Internal, yang diukur melalui keberadaan framework internal control, pelaksanaan proses pengendalian, ada tidaknya asersi internal control, ada tidaknya laporan keuangan audited, ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan, serta skor efektivitas sistem pengendalian intern.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 telah dilakukan asesmen pada 13 BUMN, 12 diantaranya telah selesai dan 1 lainnya, yaitu PT TWC masih dalam proses asesmen. Capaian pada 12 BUMN yang telah selesai adalah sebagai berikut:

<b>Nama BUMN</b>	<b>Skor</b>	<b>Kategori</b>
PT Pelabuhan Indonesia	90.79	Sangat Baik
PT PP Presisi	86.82	Sangat Baik
PT Kereta Commuter Indonesia	88.68	Sangat Baik
PT Kawasan Industri Medan	84.43	Baik
PT Len Industri (Persero)	83.68	Baik
PT Pembangunan Perumahan (Persero Tbk.)	93.29	Sangat Baik
Perum Pembangunan Perumahan Nasional	87.25	Sangat Baik
PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	87,16	Sangat Baik
PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)	83.67	Baik
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	88.68	Sangat Baik
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	86.29	Sangat Baik
PT Pos Indonesia (Persero)	85.23	Sangat Baik

<b>Sasaran Program</b>	<b>5</b>	<b>Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha</b>
------------------------	----------	---

Pencapaian Sasaran Program 5 ditunjukkan dengan jumlah BUMN yang dapat memperoleh nilai baik pada hasil pengukuran akuntabilitas korporasi sebagai pengelola kekayaan negara yang dipisahkan dalam rangka mendukung pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan pencapaian sasaran program 6 diukur dengan menggunakan seluruh dimensi dalam ICORPAX, dimana seluruh dimensi ini mewakili akuntabilitas BUMN secara komprehensif, yang terdiri dari:

1. Dimensi Akuntabilitas Korporasi pada Pembangunan
2. Dimensi Akuntabilitas Korporasi pada Keuangan Negara
3. Dimensi Kepatuhan dan Efektivitas Operasional
4. Dimensi Efektivitas Sistem Tata Kelola Korporasi
5. Dimensi Efektivitas Pengendalian Fraud

Pengukuran indeks tersebut dilakukan dengan menggunakan sumber utama dari data terpublikasi, berupa Laporan Tahunan {Annual Report} BUMN, informasi yang berasal dari website resmi BUMN, dan laporan-laporan dari Institusi/Lembaga yang validitasnya terjamin. Pelaksanaan atas pengukuran ICORPAX juga dapat diperkuat dengan melakukan klarifikasi/konfirmasi kepada masing-masing BUMN.

Target kinerja pada indikator BUMN dengan Akuntabilitas Baik adalah 9 BUMN. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebanyak 11 BUMN atau 122,22% dari target.

Rincian BUMN dengan Akuntabilitas Baik adalah sebagai berikut:

No	BUMN dengan Akuntabilitas Baik
1	PT LEN Industri (Persero)
2	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.
3	PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)
4	Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara
5	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)
6	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
7	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)
8	Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia
9	PT Angkasa Pura I (Persero)
10	PT Hotel Indonesia Natour (Persero)
11	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>6</b>	<b>Meningkatnya kualitas Pengendalian Intern pada Kementerian/Lembaga dan Badan Usaha</b>
--------------------------	----------	---

Sasaran ini merupakan respon atas kondisi yang akan dicapai/diwujudkan melalui pendampingan dan pengawasan BPKP pada setiap tahun pada periode tahun 2020-2024 yang mencerminkan tingkat kematangan pelaksanaan pengendalian internal pemerintah dan tingkat kemampuan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, serta serta Satuan Pengawas Intern (SPI) pada korporasi.

Keberhasilan sasaran strategis ini akan diukur melalui 5 indikator yaitu:

1. Persentase K/L dengan Indeks Manajemen Risiko  $\geq$  Level 3

Indeks Manajemen Risiko merupakan suatu model yang digunakan untuk mengukur kondisi karakteristik dasar dan tingkat kematangan pengelolaan risiko di suatu K/L/P. Model tersebut memadukan budaya (*culture*), tata kelola (*governance*), dan proses terkait manajemen risiko. Semakin tinggi Indeks Manajemen Risiko, diharapkan akan semakin baik kualitas pengelolaan manajemen risiko dan pencapaian tujuan instansi pemerintah. Pengukuran kualitas implementasi MR dilaksanakan dengan pendekatan *maturity level*, *capability level* maupun *maturity objectives*. Ketiga

pendekatan tersebut memberikan gambaran kualitas implementasi MR yang dilaksanakan oleh suatu organisasi, dengan melihat lima dimensi: struktur, budaya, proses, penggunaan aplikasi (teknologi informasi), dan hasil.

Indikator ini dinilai secara kumulatif sejak tahun pertama hingga tahun terakhir Rencana Strategis Deputi Bidang Akuntan Negara.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, jumlah Kementerian/Lembaga yang telah mencapai MRI  $\geq$  Level 3 adalah sebanyak 2 K/L yaitu Kementerian BUMN dan LPP TVRI.

## 2. Persentase K/L dengan Maturitas SPIP $\geq$ Level 3

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. Setiap tingkat maturitas memiliki karakteristik dasar yang menunjukkan peran atau kapabilitas penyelenggaraan SPIP dalam mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah. Semakin tinggi tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP, diharapkan akan semakin baik kualitas pencapaian tujuan instansi pemerintah dan birokrasi yang semakin berkualitas. Indikator maturitas penyelenggaraan SPIP mengindikasikan kinerja BPKP dari hasil pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Indikator ini mengukur penyelenggaraan sistem pengendalian intern pada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, serta mengidentifikasi area-area penyelenggaraan pengendalian intern yang memerlukan perbaikan peningkatan penyelenggaraan SPIP. Maturitas SPIP diukur berdasarkan tingkat kematangan pada 5 unsur pengendalian yaitu: 1) lingkungan pengendalian; 2) penilaian risiko; 3) kegiatan pengendalian; 4) informasi dan komunikasi; dan 5) pemantauan pengendalian intern.

Indikator ini dinilai secara kumulatif sejak tahun pertama hingga tahun terakhir Rencana Strategis Deputi Bidang Akuntan Negara.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, seluruh Kementerian/Lembaga yang diampu, yaitu sebanyak 3 K/L telah mencapai Maturitas SPIP  $\geq$  Level 3.

## 3. Persentase APIP K/L dengan Kapabilitas APIP $\geq$ Level 3

Kapabilitas APIP merupakan kemampuan yang dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan. Indikator ini diukur dengan model yang mengacu kepada *Internal Audit Capability Model (IACM)* yang dikembangkan oleh *The Institute of Internal Auditor (IIA)*. IACM menunjukkan langkah-langkah untuk naik dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang

kuat dan efektif terkait dengan organisasi yang lebih matang. Di dalam model IA-CM, APIP dibagi menjadi lima level, yaitu Level 1 (*Initial*), Level 2 (*Infrastructure*), Level 3 (*Integrated*), Level 4 (*Managed*), dan Level 5 (*Optimized*).

Indikator Kapabilitas APIP pada kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah mencerminkan tingkat kapabilitas aparat pengawasan intern kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan peran APIP yang efektif. Dari indikator ini dapat diketahui kapabilitas APIP kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, serta teridentifikasi area-area kapabilitas APIP yang memerlukan perbaikan untuk peningkatan kapabilitas APIP.

Indikator ini dinilai secara kumulatif sejak tahun pertama hingga tahun terakhir Rencana Strategis Deputi Bidang Akuntan Negara.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, seluruh Kementerian/Lembaga yang diampu, yaitu sebanyak 3 K/L telah mencapai Kapabilitas APIP  $\geq$  Level 3.

#### 4. Persentase Badan Usaha dengan Indeks Manajemen Risiko $\geq$ Level 3

Pada sektor Korporasi/Badan Usaha, manajemen risiko pada umumnya telah terintegrasi dalam proses bisnis sehari-hari. Badan Usaha dengan MRI Baik tercapai apabila aktivitas manajemen organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis; menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan. Indikator ini diukur berdasarkan hasil asesmen manajemen risiko pada BUMN, BUMD dan BLU/D yang berada pada maturitas MR Level 3.

Indikator ini dinilai secara kumulatif sejak tahun pertama hingga tahun terakhir Rencana Strategis Deputi Bidang Akuntan Negara.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, dari 24 BUMN/anak perusahaan yang ditargetkan untuk mencapai maturitas MR  $\geq$  Level 3, realisasinya telah mencapai 23 BUMN/anak perusahaan, baik yang telah diases oleh BPKP, konsultan maupun self assessment. Pada Triwulan IV Tahun 2023, direncanakan akan dilaksanakan assessment MR pada 3 BUMN dengan peluang cukup baik untuk mencapai level 3, sehingga diharapkan jumlah BUMN dengan MR Level 3 akan mencapai target.

#### 5. Persentase BUMN dengan Kapabilitas Satuan Pengawas Intern $\geq$ Level 3

Dalam rangka mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik, Korporasi perlu mengevaluasi kualitas fungsi audit internal (Satuan

Pengawasan Intern) untuk menilai kepatuhan terhadap *internal audit charter*, standar dan kode etik, serta efisiensi dan efektivitas fungsi audit internal dalam memenuhi kebutuhan berbagai *stakeholders*-nya. Selain itu, untuk meningkatkan fungsi audit internal, SPI harus menilai kapabilitasnya dan melaksanakan rekomendasi perbaikan.

Penilaian Kapabilitas SPI pada BUMN dilakukan dengan menggunakan konsep IACM untuk sektor korporasi. Kapabilitas SPI Level 3 diperoleh jika SPI mampu memberikan *assurance* secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern. Indikator ini diukur dengan menggunakan Jumlah BUMN dengan kapabilitas SPI Level 3 (dari skala 1-5) dibagi jumlah total BUMN.

Indikator ini dinilai secara kumulatif sejak tahun pertama hingga tahun terakhir Rencana Strategis Deputi Bidang Akuntan Negara.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, jumlah BUMN yang memiliki SPI dengan kapabilitas Level 3 adalah sebanyak 5 BUMN/Anak Perusahaan atau mencapai 100% dari target yang ditetapkan untuk tahun 2023 yaitu 5 BUMN.

## B. Agenda Prioritas Pengawasan Pendukung Pencapaian Sasaran

Pada triwulan II Tahun 2023, Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan melaksanakan 8 Agenda Prioritas Pengawasan dan berperan selaku kontributor. Rincian Agenda Prioritas Pengawasan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

No	Agenda Prioritas Pengawasan	Ringkasan Hasil Pengawasan
1	Pengawasan atas P3DN	Pengawasan dilakukan dalam rangka mengukur indeks kepatuhan BUMN atas program P3DN. Pada BUMN, mayoritas (43,86% BUMN) berada pada tingkat kepatuhan dengan skor antara 11 hingga 50, hanya 17,54% yang mencapai skor >75. Sedangkan, sebanyak 21,93% BUMN yang memiliki skor <10 dan skor 0. Kondisi ini mengindikasikan hambatan serius dalam penerapan program ini atau ketidakpatuhan serta tidak mengisi survei sama sekali.
2	Reviu Proyek Strategis Nasional	Pengawasan dilakukan pada PSN sektor Konektivitas atas 13 aspek. Dengan ketercapaian target fisik adalah sebanyak 7 PSN.
3	Pengawasan atas Akuntabilitas BUMN	Pengawasan atas akuntabilitas BUMN utamanya dilakukan melalui penilaian Icorpax, di mana hasil pengukuran tiap dimensinya menjadi capaian pada 4 indikator kinerja kegiatan sebagaimana

No	Agenda Prioritas Pengawasan	Ringkasan Hasil Pengawasan
		telah disampaikan pada sub bab Capaian Outcome.
4	Pengawasan atas Penguatan Infrastruktur Konektivitas-Kereta	Ketepatan perencanaan pembangunan jalur kereta api, akuntabilitas keuangan dan kinerja, kesinambungan pembangunan jalur kereta terintegrasi dan utilisasi infrastruktur kereta sesuai peruntukannya. Pengawasan dilakukan pada KCJB, reaktivasi jalur Cibatu-Garut
5	Pengawasan atas Penguatan Infrastruktur Konektivitas-Bandara	Pengawasan yang dilakukan adalah terkait dengan evaluasi atas tarif jasa kebandarudaraan
6	Pengawasan atas Penguatan Infrastruktur Konektivitas-Pelabuhan	Pengawasan dilakukan atas pembangunan infrastruktur pada PT Pelindo, utamanya pasca merger, standarisasi sistem, serta ekspansi bisnis yang dilakukan oleh PT Pelindo
7	Pengawasan atas Optimalisasi Pendapatan Negara	Pengawasan dilakukan pada PT Telkom atas pengelolaan PNBPN. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa PT Telkom belum memiliki kebijakan khusus maupun SOP sebagai turunan dari kebijakan Dividen yang tertuang dalam Anggaran Dasar (AD), PT Telkom tidak menetapkan target dividen baik dalam RKAP maupun Key Performance Indicator (KPI) Direksi.
8	Reviu Pengadaan Barang/Jasa pada KL	Berdasarkan data serapan TW II, baik Kementerian BUMN, LPP TVRI, maupun LPP RRI belum mencerminkan ketepatan serapan RPD, namun demikian ketiga K/L menunjukkan tren yang relatif naik atas RPD TW II.

### C. Faktor Pendukung Ketercapaian Kinerja dan Kendala Pencapaian Kinerja

Dalam pelaksanaan pengawasan Triwulan II tahun 2023, faktor yang mendukung ketercapaian kinerja adalah penggunaan waktu pengawasan yang efektif, di mana tim pengawasan melakukan beberapa penugasan dalam waktu yang bersamaan, dengan mengoptimalkan *on desk* reviu dan *focus group discussion* secara *online* dengan *counterpart*.

Belum terdapat kendala dalam pencapaian kinerja, namun demikian perlu dipertimbangkan untuk melakukan kerja sama pengawasan dengan mitra.

### D. Dukungan SDM

Selama pelaksanaan pengawasan dalam Triwulan II Tahun 2023, dukungan SDM terdiri dari 4 Pengendali Teknis, 6 Ketua Tim dan 10 orang Anggota Tim. Dengan keterbatasan SDM tersebut, banyaknya penugasan disiasati dengan pelaksanaan beberapa penugasan dalam waktu yang bersamaan oleh tim yang sama, dengan

mengoptimalkan pelaksanaan *remote audit*, *remote review* dan FGD secara *hybrid* dengan *counterpart*. Serta dengan bantuan tenaga auditor dari unit lain, yaitu Pusbin JFA, Puslitbangwas, dan Biro SDM, untuk sementara waktu, terutama dalam pelaksanaan pengawasan Icorpax.

#### E. Capaian Output Pengawasan per Triwulan II Tahun 2023

Realisasi capaian output pengawasan Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 adalah sebanyak 9 LHP dari target 19 LHP untuk Tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3  
Ringkasan Capaian Output Pengawasan  
Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata,  
Kawasan Industri dan Perumahan  
s.d Triwulan II Tahun 2023

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Target LHP	Realisasi LHP	Capaian (%)
4222.FAG.028	Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah	4	2	50%
4222.FAG.U11	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara, Daerah Dan Desa	2	2	100%
4222.FAG.U31	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Kekayaan Negara/Daerah Yang Dipisahkan Dan BLU/BLUD	4	3	75%
4222.UAG.U22	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Sektor Penguatan Infrastruktur Dan Konektivitas	1	1	100%
4222.UAG.U23	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Sektor Pembangunan Ekonomi	2	1	50%
4222.UAG.U51	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko Atas Kualitas Pengendalian Intern K/L	2	0	0%
4222.UAG.U53	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko Atas Kualitas Pengendalian Intern Badan Usaha	4	0	0%

Realisasi laporan hasil pengawasan per indikator kinerja kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi LHP
4222.FAG.028	Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah	Laporan monitoring dukungan BUMN Pariwisata Laporan reuiu PSN konektivitas
4222.FAG.U11	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara, Daerah Dan Desa	Laporan evaluasi perencanaan anggaran K/L
4222.FAG.U31	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Kekayaan Negara/Daerah Yang Dipisahkan Dan BLU/BLUD	Laporan Icorpax pada BUMN Sektor Logistik, Pariwisata, dan Media
4222.UAG.U22	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Sektor Penguatan Infrastruktur Dan Konektivitas	Laporan reuiu tata kelola PSN
4222.UAG.U23	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Sektor Pembangunan Ekonomi	Laporan pemetaan risiko P3DN pada BUMN
4222.UAG.U51	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko Atas Kualitas Pengendalian Intern K/L	-

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi LHP
4222.UAG.U53	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko Atas Kualitas Pengendalian Intern Badan Usaha	-

#### F. Rencana Tindak Pencapaian Target Kinerja

Beberapa indikator kinerja belum mencapai target per triwulan II Tahun 2023, seperti indikator BUMN dengan tata kelola baik. Hal ini disebabkan beberapa BUMN masih dalam proses asesmen GCG. Dalam 2 triwulan ke depan, akan dilakukan asesmen GCG pada BUMN Pariwisata, seperti PT TWC, PT HIN, dan anak perusahaan PT Garuda Indonesia.

Untuk mencapai kekurangan capaian target MR BUMN, dalam 2 triwulan ke depan akan dilakukan asesmen pada BUMN Pariwisata yaitu PT ITDC, BUMN Konektivitas, yaitu PT Pelindo, dan BUMN pada sektor Kawasan Industri atau sektor Perumahan.

#### G. Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, anggaran yang terealisasi adalah sebesar Rp476.386.700,00 atau 31,24% dari total anggaran, dengan ringkasan sebagai berikut:

Tabel 4  
Anggaran dan Realisasi Keuangan  
Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata,  
Kawasan Industri dan Perumahan  
s.d Triwulan II Tahun 2023

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
4222.FAG.028	Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah	635.600.000	50.595.600	7.98%
4222.FAG.U11	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara, Daerah Dan Desa	54.000.000	7.020.000	13.12%
4222.FAG.U31	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Kekayaan Negara/Daerah Yang Dipisahkan Dan BLU/BLUD	218.000.000	162.964.700	74.75%
4222.UAG.U22	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Sektor Penguatan Infrastruktur Dan Konektivitas	194.400.000	99.813.800	51.87%
4222.UAG.U23	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Sektor Pembangunan Ekonomi	302.400.000	155.212.600	51.33%
4222.UAG.U51	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko Atas Kualitas Pengendalian Intern K/L	21.600.000	0	0.00%
4222.UAG.U53	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko Atas Kualitas Pengendalian Intern Badan Usaha	104.000.000	780.000	0.75%
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.530.000.000</b>	<b>476.606.700</b>	<b>31.24%</b>

Demikian kami sampaikan Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2023 Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan. Atas perhatian dan perkenan Ibu Deputi, kami ucapkan terima kasih.

Direktur,

*Ditandatangani secara elektronik oleh*

Aryanto Wibowo